

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2017 – 2021



DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN

Jl. Bandara Nusawiru No. 10 Cijulang - Pangandaran
Kode Pos 46394 Tlp/Fax. (0265) 7500643
Email : dinaspkp@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
**DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN**

Jl. Bandara Nusawiru No. 10 Cijulang - Pangandaran Kode pos 46394
Tlp/Fax. (0265) 7500643 Email: dinaskpkp@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR
050 / 131 / DKPKP / IV / 2017

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017 – 2021**

**KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan oleh atasan;
- b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Dinas Kelautan, Perikanan Dan
 - Bab III : Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
 - Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
 - Bab V : Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
 - Bab VI : Indikator Kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd
 - Bab VII : Penutup
- KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk periode Tahun 2017-2021;
 - b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan setiap tahun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila diperlukan.

Ditetapkan di Cijulang
pada tanggal 17 April 2017

Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Pangandaran



RIDA NIRWANA K., S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680928 198803 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Pangandaran;
2. Wakil Bupati Pangandaran;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pangandaran;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 – 2021 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah penjabaran RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016 – 2021.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 – 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RENSTRA dimaksudkan untuk menetapkan standar ukuran keberhasilan pembangunan selama lima tahun yaitu tahun 2017 – 2021 di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sekaligus sebagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam tiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun kedepan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dokumen Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 – 2021 merupakan pedoman dalam perumusan Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam merencanakan program prioritas dan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Cijulang, 17 April 2017
KEPALA DINAS KELAUTAN,
PERIKANAN DAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN



RIDA NIRWANA K., S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680928 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
1.1. Latar Belakang-----	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan-----	2
1.3. Maksud dan Tujuan-----	2
1.4. Sistematika Penulisan -----	3
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN-----	5
2.1. Aspek Geografi Daerah dan Demografi -----	5
2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi -----	22
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD -----	41
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD -----	42
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI-----	44
3.1. Analisis Isu-isu Strategis-----	44
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis-----	48
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah -----	50
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN -----	54
4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan-----	54
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan -----	55
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan -----	56
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF-----	58
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD -----	61
BAB VII PENUTUP -----	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN-----	64

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Selama 5 (Lima) Tahun
- Lampiran 2. Indikator Kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Lampiran 3. Lokasi Pusat Pengembangan Perikanan Budidaya
- Lampiran 4. Data Lumbung Pangan Masyarakat
- Lampiran 5. SK Tim Penyusun Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Instansi adalah dokumen perencanaan SKPD jangka menengah (5 tahun), yang memuat visi, misi, tujuan strategi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 15 point 1 (1) dan pasal 19 point (2), Bahwa instansi wajib menyusun Rencana Strategis Instansi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkeadilan serta berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran ini merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2016 - 2021. Penyusunan dokumen Renstra ini berdasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, analisis lingkungan, isu-isu yang terus berkembang, serta arah kebijakan daerah dan nasional.

Dokumen Renstra ini menjadi acuan dan arahan bagi satuan kerja di lingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam merencanakan dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan selama tahun 2017 – 2021 secara menyeluruh dan terintegrasi.

Renstra yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka lima (5) tahunan.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan sebagai SKPD baru yang merupakan pengembangan dari Dinas Kelautan Pertanian dan Kehutanan berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, tupoksi, isu-isu yang terus berkembang serta arah kebijakan daerah, provinsi dan nasional.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021 adalah :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Strategis merupakan salah satu alat untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai kepada implementasi garis terdepan sehingga tujuan dan sasaran organisasi tercapai.

Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran RPJM – Daerah Kabupaten Pangandaran 2016 - 2021, sebagai dokumen perencanaan pembangunan kelautan, perikanan dan ketahanan pangan, yang menjadi arah kebijakan pembangunan bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun.

1.3.2. Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2021 sebagai dokumen untuk pedoman pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021, sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tujuan :

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi daerah di bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- 2) Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran ke dalam program prioritas serta Rencana Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.
- 3) Menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan dan sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bab ini memaparkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dan Sumberdaya yang dimiliki.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dan isu – isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memaparkan visi dan misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Pada bab ini juga diuraikan tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memaparkan rencana program dan kegiatan menurut bidang, indikator kerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memaparkan indikator kinerja menurut bidang yang bersumber dari tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan secara singkat tentang peran dari dokumen renstra

BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

2.1. Aspek Geografi Daerah dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Kabupaten Pangandaran memiliki ibukota kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Parigi;
- b. Kecamatan Cijulang;
- c. Kecamatan Cimerak;
- d. Kecamatan Cigugur;
- e. Kecamatan Langkaplancar;
- f. Kecamatan Mangunjaya;
- g. Kecamatan Padaherang;
- h. Kecamatan Kalipucang;
- i. Kecamatan Pangandaran; dan
- j. Kecamatan Sidamulih.

Luas Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.011,69 km², dengan distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Cimerak	118,18
2	Cijulang	93,16
3	Cigugur	97,29
4	Langkaplancar	177,19
5	Parigi	98,04
6	Sidamulih	77,98
7	Pangandaran	60,77
8	Kalipucang	136,78
9	Padaherang	89,27
10	Mangunjaya	63,03
Jumlah		1.011,69

Sumber: RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

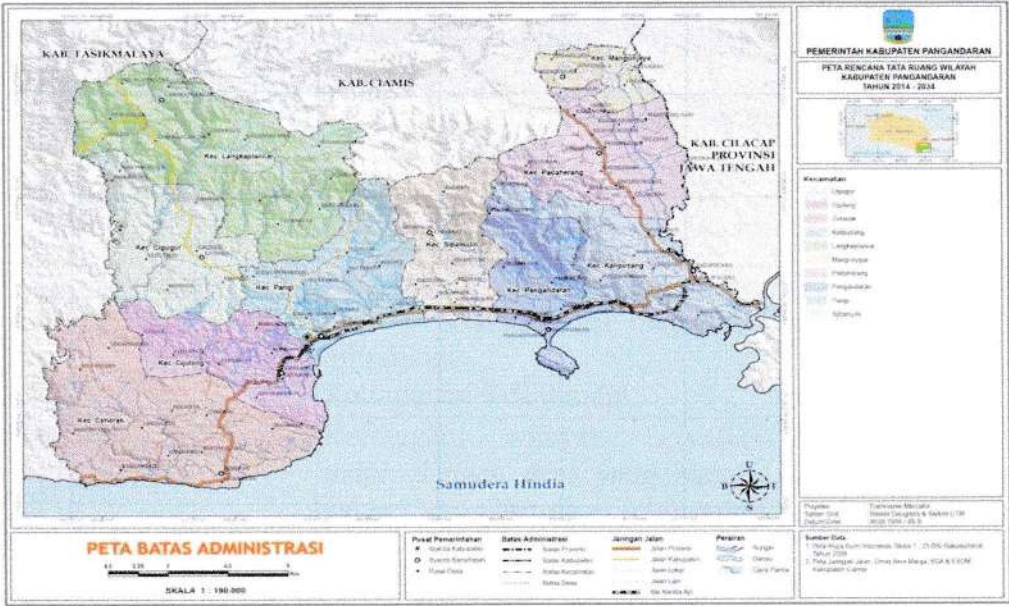
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas kabupaten dan batas kecamatan.

Gambar 2.2

Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran



Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

b) Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 - 700 mdpl. Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	☐ Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. ☐ Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.
2	Cijulang	☐ Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. ☐ Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	☐ Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. ☐ Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	☐ Wilayah ini bukan pesisir melainkan dataran tinggi. ☐ Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
5	Parigi	☐ Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl ☐ Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.
6	Sidamulih	☐ Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. ☐ Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	☐ Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. ☐ Ketinggian: 3-500 mdpl.
8	Kalipucang	☐ Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). ☐ Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.
9	Padaherang	☐ Wilayah ini bukan pesisir. ☐ Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl. ☐ Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). ☐ Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	☐ Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. ☐ Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

c) Kondisi Geologi

Menurut kondisi geologinya, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah-timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya :

- i. Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng $<5\%$. Ketinggian antara 0-50 m diatas

permukaan air laut. Melampar di pesisir pantai antara Pangandaran-Parigi-Cijulang dan Kalipucang.

- ii. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng $>25\%$, ketinggian antara 100-700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Melampar dibagian tengah memanjang kearah Barat Daya-Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air.

a) Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang

- ☐ Tanah lapukan berupa lempung pasiran-kerikilan, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10-50 cm, daya dukung sedang-tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3-10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
- ☐ Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya hutan dan hutan lindung sebagai daerah resapan air dan sebagian baik untuk perkebunan tanaman keras per tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang- Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.

b) Perbukitan Terjal Pananjung

- ☐ Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.

- iii. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping) :

Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasiran, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini melampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cijulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke Utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik.

Tanah lapukan umumnya berupa lempung kerikilan yang sangat subur untuk pertanian lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang-tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi

amblesan. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4

Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

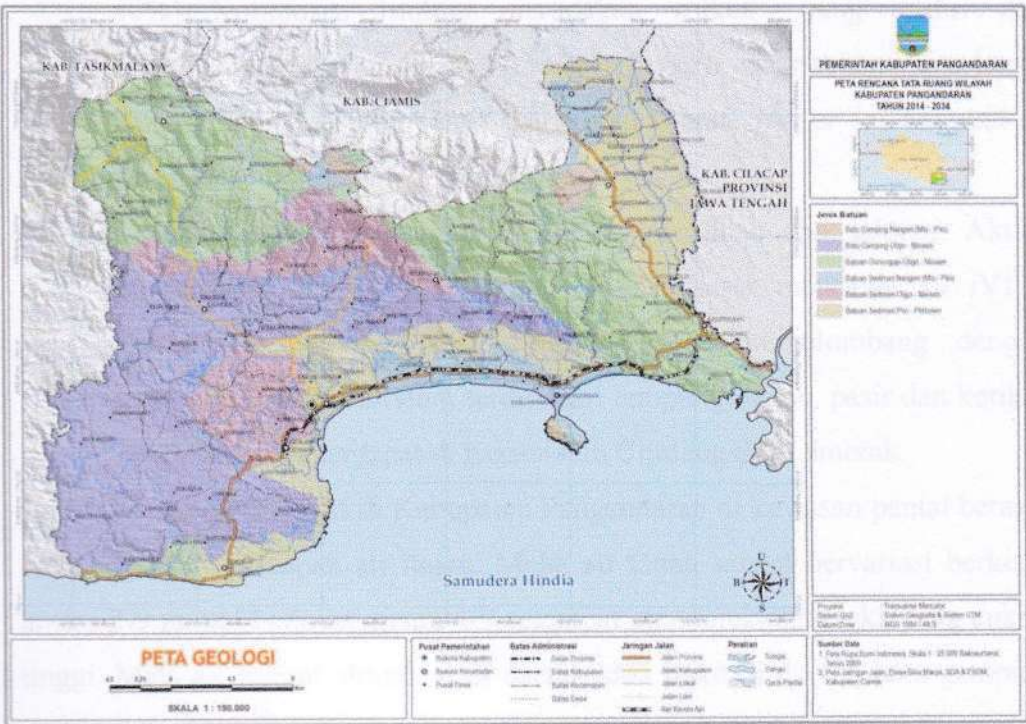
No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	1.591,68
2	Batu Gamping Oligo – Miosen	35.752,65
3	Batuan Gunungapi Oligo – Miosen	37.048,80
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	6.520,38
5	Batuan Sedimen Oligo – Miosen	12.021,43
6	Batuan Sedimen Plio – Plistosen	19.888,43
	Grand Total	112.823,37

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

Peta sebaran geologi di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.5

Peta Geologi Kabupaten Pangandaran



Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

d) Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang.

Kabupaten Pangandaran berada dalam 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Cijulang, DAS Cimedang, dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
DAS di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Cijulang	56.006,35
2	DAS Cimedang	34.929,51
3	DAS Citanduy	21.887,50
	Grand Total	112.823,37

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu :

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10 iV100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara 2-9 m, pH berkisar antara 6-9 setempat menunjukkan angka yang cukup tinggi. Mata air banyak dijumpai di daerah kaki bukit di daerah batu gamping dan breksi vulkanik. Debit mata air bervariasi diantara 0,2 l/detik hingga 20

l/detik bahkan ada juga yang mencapai 100 l/detik. Mata air di sekitar Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi sudah dimanfaatkan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air baku (mata air) yang merupakan milik Pemda yaitu :

1. Mata air Kalisodong Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 105,0 C/det;
2. Mata air Guhahawu Desa Selasari Kecamatan Parigi, Debit 7,5 C/det;
3. Mata air Madasari Desa Masawah Kecamatan Cimerak, Debit 7,5 C/det;
4. Mata air Cijumleng Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih, Debit 32,5 C/det.

Peta sebaran DAS di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.6

Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran



Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

e) Kondisi Klimatologi

Di Kabupaten Pangandaran, suhu udara rata-rata pada tahun 2010 berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata tinggi karena terletak di dataran rendah. Kabupaten Pangandaran sendiri terletak pada lahan dengan keadaan morfologi datar-bergelombang sampai bergunung, dengan kemiringan lereng berkisar antara 0-40 % dengan sebaran 0-2 % terdapat di bagian tengah-timur laut ke selatan dan 2-40 % tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan.

Data curah hujan dan jumlah hari hujan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pangandaran sebagai berikut:

Tabel 2.6

Kondisi Curah Hujan Kabupaten Pangandaran Tahun 2011

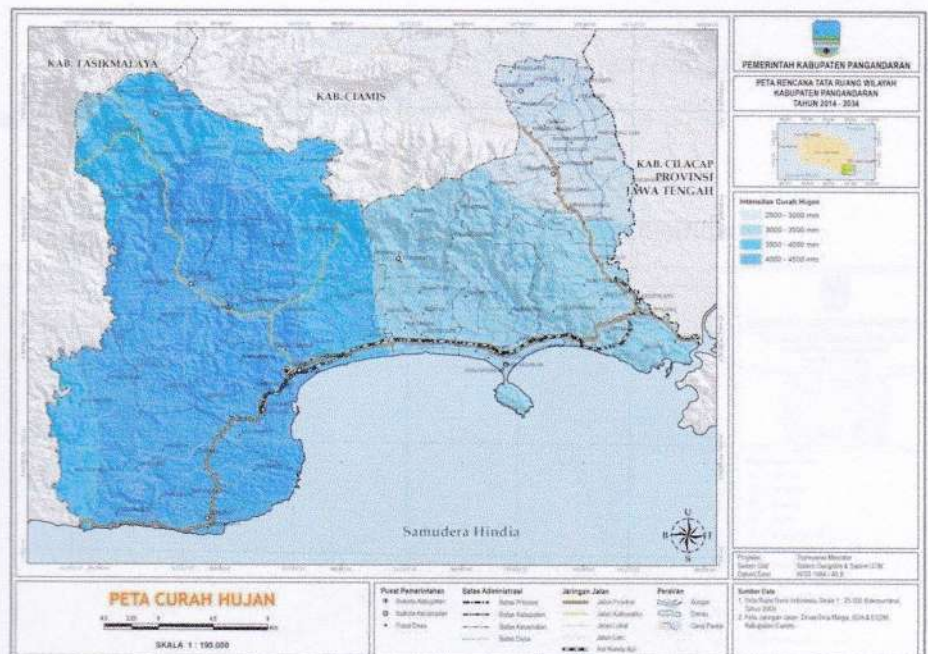
No	Kecamatan	Hari Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
1	Cimerak	74	997
2	Cijulang	132	2611
3	Cigugur	106	1634
4	Langkaplancar	184	2576
5	Parigi	160	3163
6	Sidamulih	150	1604
7	Pangandaran	130	1480
8	Kalipucang	105	3161
9	Padaherang	48	651
10	Mangunjaya	154	2206

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

Adapun Gambaran sebaran curah hujan dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar 2.7

Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran



Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran

f) Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sudah bervariasi, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan

untuk kebun seluas 60.139,99 ha atau sekitar 53,3% yang dilanjutkan dengan penggunaan sawah irigasi seluas 12.970,50 ha atau sekitar 11,5%. Penggunaan lahan pada Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012

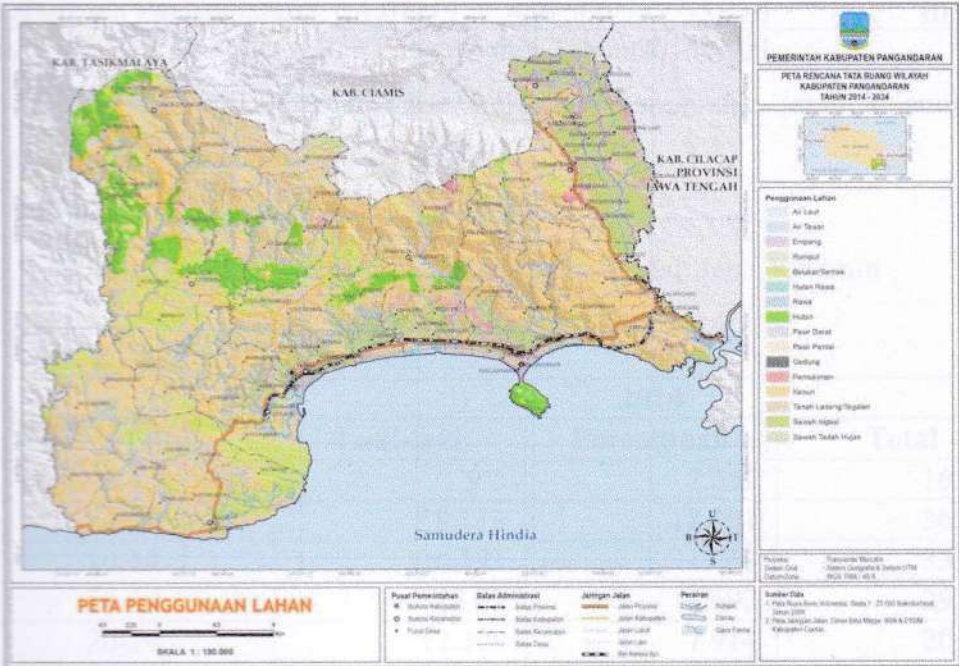
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Air Laut	55,68
2	Air Tawar	968,18
3	Belukar/Semak	10.842,62
4	Empang	31,83
5	Gedung	4,84
6	Hutan	7.020,97
7	Hutan Rawa	408,91
8	Kebun	60.135,99
9	Pasir Darat	131,86
10	Pasir Pantai	11,99
11	Pemukiman	5.656,85
12	Rawa	166,58
13	Rumput	392,56
14	Sawah Irigasi	12.970,50
15	Sawah Tadah Hujan	8.338,82
16	Tanah Ladang/Tegalan	5.685,18
	Grand Total	112.823,37

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

Sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.8

Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pangandaran



Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

2.1.2. Kondisi Demografi

Aspek kependudukan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perencanaan dan realisasi pembangunan. Penduduk memegang peranan yang sangat vital yaitu sebagai objek maupun subjek dari pembangunan. Kondisi kependudukan dapat dilihat dari tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Sedangkan untuk menentukan sasaran pembangunan, maka data kependudukan sangat diperlukan mengenai jumlah, jenis kelamin, struktur, dan komposisi maupun penyebaran/kepadatan penduduk suatu wilayah. Kondisi kependudukan ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat berharga apabila diiringi dengan kualitas SDM yang baik.

Gambaran detail mengenai keadaan kependudukan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8

Luas Wilayah, Jumlah, Kepadatan dan Distribusi Penduduk
Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Akhir Tahun 2014

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Orang/Km ²)	Distribusi Penduduk (%)
1	Cimerak	98	48,201	492	1
2	Cijulang	93	29,390	316	6
3	Cigugur	118	51,703	438	1
4	Langkaplancar	97	23,940	247	5
5	Parigi	177	53,837	304	1
6	Sidamulih	78	36,035	462	8
7	Pangandaran	61	77,857	1,276	1
8	Kalipucang	137	43,512	318	1
9	Padaherang	119	60,817	511	1
10	Mangunjaya	33	31,208	946	7
Kabupaten Pangandaran		1,011	456,500	5,310	10

Sumber: RPKMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.9

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2014

Kelompok Umur	2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	9.2	7.552	16.752
5-9	18.113	18.001	36.114
10-14	16.191	17.68	33.871
15-19	15.02	14.692	29.712
20-24	12.398	7.914	20.312
25-29	8.029	12.397	20.426

Kelompok Umur	2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total
30-34	15.734	14.704	30.438
35-39	12.174	13.911	26.085
40-44	17.603	16.956	34.559
45-49	15.272	15.71	30.982
50-54	14.323	17.421	31.744
55-59	12.323	13.548	25.871
60-64	12.198	13.079	25.277
65 +	19.127	15.649	34.776
Total	197.705	199.214	396.919

Sumber : RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021

Terlihat pada tabel di atas (Tabel 2.9) persentase penduduk laki-laki maupun perempuan sangat tinggi pada struktur penduduk usia produktif (15-64 tahun) yaitu mencapai 70% dari total penduduk, ini menjadi indikasi bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki modal Sumberdaya Manusia yang sangat baik.

Adapun dari jumlah penduduk sebanyak 396.919 orang di atas yang potensial memiliki peran dalam pembangunan bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan terdiri dari 1788 RTP, 2281 RTBP, 80 orang bakul, 9 Koperasi, 191 KUB, 211 Pokdakan, 181 LPM.

Pelaku Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Pangandaran terdiri dari Rumah Tangga Perikanan, Rumah Tangga Buruh Perikanan dan Bakul dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.10

Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pangandaran s.d Tahun 2016

Kecamatan	Pelaku Usaha Perikanan Tangkap		
	RTP	RTBP	Bakul
Cimerak	-	35	11
Cijulang	421	178	9
Cigugur	-	-	-
Langkaplancar	-	-	-
Parigi	305	407	26
Sidamulih	-	-	-
Pangandaran	1062	1381	34
Kalipucang	-	280	-
Padaherang	-	-	-
Mangunjaya	-	-	-
Total	1788	2281	80

RTP : Rumah Tangga Perikanan (Pemilik atau Pemilik Merangkap Pekerja)

RTBP : Rumah Tangga Buruh Perikanan (Pekerja/ABK)

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap DKPKP 2016

Kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran terdiri dari Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, Pokdakan, KUB dan Koperasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.11
Jumlah Kelompok Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Pangandaran s.d Tahun 2016

Kecamatan	Kelompok			
	Lumbung Pangan Masy.	Pokdakan	KUB	Koperasi
Cimerak	10	8	12	3
Cijulang	9	13	23	2
Cigugur	8	7	-	-
Langkaplancar	8	33	-	-
Parigi	22	25	16	1
Sidamulih	34	12	3	-
Pangandaran	11	12	118	2
Kalipucang	10	16	19	1
Padaherang	34	35	-	-
Mangunjaya	35	50	-	-
Total	181	211	191	9

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan 2016

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan perikanan pada dasarnya mencakup berbagai kekuatan yang terdapat di internal sistem perikanan maupun berbagai peluang yang dapat diraih untuk mengembangkan sistem perikanan secara optimal dan berkelanjutan.

Terkait dengan hal tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran pada akhir tahun 2014 adalah 456.500 orang (RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pangandaran) yang diprediksi semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya sehingga berpotensi meningkatnya permintaan kebutuhan bahan pangan.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemenuhan produksi pangan tidak dapat lagi hanya mengandalkan produksi dari lahan pertanian di darat, namun juga harus dipenuhi dari lingkungan perairan, terutama untuk produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Terlebih lagi masyarakat semakin sadar dan semakin membutuhkan bahan pangan yang bernilai gizi tinggi yang terkandung dalam ikan. Hal ini tentu saja menjadi peluang pengembangan perikanan ke depan.

Seiring dengan itu, peranan dan posisi perikanan semakin strategis di masa depan. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan produk-produk perikanan masih menjadi sumber utama konsumsi protein hewani di Indonesia.

Keberagaman sumberdaya di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ekonomi produktif. Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pangan sebanyak 10 unit dengan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 sebanyak 1.049.492,37 kg. Panjang pantai di Kabupaten pangandaran yaitu 91 km dengan jumlah nelayan yang ada sebanyak 5.084 orang, kondisi potensi perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Data Potensi Perikanan Tangkap Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jml. TPI (Unit)	Produksi (Kg)	Juml. Nelayan (Org)
1	Cimerak			593
	- TPI Legokjawa	1	47.708,25	
	- TPI Muaragatah	1	1,426,86	
	- TPI Madasari	1	8.132,58	
2	Cijulang			627
	- TPI Nusawiru	1	61.060,60	
	- TPI Batukaras	1	198.966,93	
3	Parigi			764
	- TPI Parigi	1	182.683,85	
4	Cigugur	-	-	-
5	Langkaplancar	-	-	-
6	Sidamulih	-	-	315
7	Pangandaran		549.513,30	2.207
	- TPI Cikidang	1		
	- TPI Jongorbatu	1		
	- TPI Pangandaran	1		
8	Kalipucang	1	-	562
9	Padaherang	-	-	14
10	Mangunjaya	-	-	2
Total		10	1.049.492,37	5.084

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap DKPKP 2016

Potensi perikanan budidaya Kabupaten Pangandaran meliputi jumlah petani ikan sebanyak 3.629 orang yang tergabung dalam Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebanyak 211 kelompok, Luas Perairan Umum (Rawa, Situ, Danau, Embung, Cekdam dll) sebanyak 239,82 m² dan panjang sungai 48 km. Data potensi perikanan budidaya disajikan pada lampiran 3 dan data produksi perikanan budidaya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13

Data Potensi dan Produksi Perikanan Budidaya Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Pangandaran s.d Tahun 2016

Kecamatan	Data Potensi dan Produksi			
	Jumlah Pokdakan	Jumlah Petani Ikan (Orang)	Luas Kolam/ Sarana Bdy. (m ²)	Jumlah Produksi (Ton)
Cimerak	8	175	7.200	1,6
Cijulang	13	188	41.600	10,1
Cigugur	7	122	36.000	8,7
Langkaplancar	33	782	110.050	26,6
Parigi	25	323	66.040	21,6
Sidamulih	12	220	55.115	13,1
Pangandaran	12	166	110.000	26,4
Kalipucang	16	262	101.992	24,4
Padaherang	35	467	137.173	39,88
Mangunjaya	50	924	701.050	168,252
Total	211	3.629	1.366.220	340,632

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya DKPKP 2016

Potensi berikutnya adalah perikanan tangkap di perairan umum daratan (PUD) yang meliputi danau, waduk, sungai, rawa dan genangan air lainnya, dengan luas sekitar 239,82 m² dan panjang sungai 48 km.

Potensi perairan umum yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Data Potensi Perairan Umum Tahun 2016

No	Kecamatan	Desa	Jenis Perairan	Luas
1.	Mangunjaya	Kertajaya	Rawa Cogekan	3 Ha
2.	Padaherang	Kedungwuluh, Karang Mulya, Karang Pawitan	Rawa Cilalai	160 Ha
		Cibogo	Rawa Lengkong	70 Ha
		Sukanagara	Kalimati Sukasari	0,70 Ha
3.	Kalipucang	Bagolo	Cekdam Bantar Mangu	0,42 Ha
4.	Pangandaran	Sukahurip	Sungai Matras	4 Km
			Sungai Bengkekan	5 Km
			Sungai Sindangkasih	4 Km
5.	Sidamulih	Sidamulih	Bendungan Waterpum	5 Km
			Ledeng Sungai Cibeureum	5 Km
		Cikalong	Sungai Jumbleng	2 Km

No	Kecamatan	Desa	Jenis Perairan	Luas
6.	Parigi	Selasari	Sungai Goa Lanang	2 Km
7.	Cijulang	Cibanten	Sungai Cibanten	5 Km
		Kertayasa	Sungai Merjan	5 Km
		Batukaras	Sungai Cisamping	3 Km
		Margacinta	Sungai Margacinta	3 Km
8.	Cimerak	Masawah	Rawa Madasari	5 Ha
9.	Cigugur	Bunisari	Embung cioe	0,28 Ha
		Campaka	Sungai Jurago dan embung ciawi	5 Km
10.	Langkaplancar	Karang Kamiri	Cekdam Karang Kamiri	0,42 Ha

Sumber : Bidang Perikanan Budidaya DKPKP 2016

Potensi selanjutnya adalah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang mencakup potensi kapal dan alat penangkap ikan serta tempat pelelangan ikan. Jumlah kapal dan alat penangkap ikan 1933 unit. Sementara itu, jumlah tempat pelelangan ikan tercatat sebanyak 10 TPI. Data jumlah kapal Perikanan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.15

Data Jumlah Kapal Perikanan Tahun 2016

No	Kecamatan	Kapal <5 GT	Kapal 5-10 GT	Kapal 10-20 GT	Kapal 20-30 GT	Kapal >30 GT	Jum.
1	Cimerak	93	-	-	-	-	93
2	Cijulang	284	1	2	1	1	289
3	Parigi	307	-	-	-	1	308
4	Pangandaran	1081	-	1	1	6	1089
5	Kalipucang	154	-	-	-	-	154
Total		1919	1	3	2	8	1933

Sumber : Bidang Perikanan Tangkap DKPKP 2016

Kekuatan internal lainnya adalah kebijakan pemerintah daerah untuk semakin berpihak pada bidang kelautan dan perikanan, antara lain tercermin dari dokumen perencanaan, dari mulai RPJP, RPJM hingga RKP. Demikian pula dengan posisi Kabupaten Pangandaran yang menjadi peluang untuk terus mengembangkan sektor kelautan dan perikanan, termasuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya dalam pemenuhan kebutuhan pangan hewani masyarakat.

Di samping itu, terdapat pula berbagai ancaman juga dari luar yang apabila tidak diantisipasi dengan baik akan berpengaruh terhadap pembangunan perikanan di Kabupaten Pangandaran.

Beberapa ancaman yang perlu dikendalikan tersebut diantaranya masih adanya lokasi rawan kekeringan dan lokasi rawan banjir di Kabupaten Pangandaran. Sebaran lokasi rawan kekeringan dan rawan banjir disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16

Lokasi Rawan Banjir dan Rawan Kekeringan
Di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Baku	Luas Areal (Ha)	
			Rawan Banjir	Rawan Kekeringan
1	Cimerak	1.396	55	535
2	Cijulang	1.404	100	399
3	Cigugur	874	0	845
4	Langkaplancar	2.269	106	466
5	Parigi	2.095	165	150
6	Sidamulih	1.025	407	714
7	Pangandaran	1.041	214	301
8	Kalipucang	918	335	185
9	Padaherang	3.670	607	55
10	Mangunjaya	1.761	106	242
Jumlah		16.453	2.095	3.892

Sumber : Bidang Ketahanan Pangan DKPKP 2016

Dalam upaya penanggulangan kerawanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Bidang Ketahanan Pangan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan telah mengembangkan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM). Lumbung pangan masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran sebanyak 181 kelompok. Pengembangan lumbung pangan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan cadangan pangan masyarakat sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan. Cadangan pangan masyarakat memiliki dua fungsi, yakni fungsi sosial sebagai cadangan pangan yang dapat dimanfaatkan pada saat kondisi darurat seperti bencana alam dan paceklik, serta fungsi ekonomi di mana ketika produksi berlimpah dapat

disimpan di lumbung dan pada saat harga sudah normal dapat dijual. Data lumbung pangan Kabupaten Pangandaran disajikan pada lampiran 4.

2.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi serta kebijakan umum daerah;
 - b. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;
 - c. penyelenggaraan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
 - e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- (3) Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:
 - a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dinas yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi dinas;
 - b. menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana kerja yang meliputi kesekretariatan, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan berdasarkan kebijakan umum dinas dan standar pelayanan minimal;

- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Dinas (SPD) serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. penyelenggaraan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan, berdasarkan visi dan misi serta tugas dan fungsi dinas;
- e. membuat rencana induk pengembangan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- f. menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- g. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah;
- h. menyelenggarakan kebijakan Pemerintah dan Provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan lingkup perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- i. memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas dinas;
- j. menyelenggarakan perumusan rencana kebutuhan/pembangunan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyelenggarakan penetapan program dan rencana kerja lingkup bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;
- l. menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan di daerah;
- m. mendistribusikan tugas kepada staf secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;

- n. menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- o. menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
- p. memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
- q. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja dinas;
- r. membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
- s. memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
- t. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan/atau Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- u. mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Kepala Dinas, membawahkan :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya; dan
- d. Bidang Ketahanan Pangan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program dinas;
- c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, serta perencanaan dan keuangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

(3) Uraian tugas sekretaris meliputi:

- a. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyelenggarakan penyusunan rencana strategis (renstra), laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip), penyusunan indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin), standar operasional prosedur (sop), standar pelayanan (sp) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
- d. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan dinas yang bersumber dari bidang;
- e. menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan ketahanan pangan;

- i. memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- l. mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup sekretariat sesuai bidang tugasnya;
- m. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
- n. mengkoordinasikan tugas staf di lingkup sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- o. memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup sekretariat untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana;
- q. mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
- r. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- s. menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- t. mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan agar terwujud tertib administrasi;
- u. menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- v. menyelenggarakan pembinaan arsiparis;
- w. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum;
- x. menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi dinas;
- y. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;

- z. mengkoordinasikan laporan kegiatan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada pimpinan;
 - aa. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan dinas kelautan, perikanan dan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan;
 - bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- (4) Sekretaris, membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan kepegawaian.
- (3) Uraian tugas kepala subbagian umum dan kepegawaian meliputi:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis kesekretariatan dalam lingkup subbagian umum dan kepegawaian;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup subbagian umum dan kepegawaian;

- c. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset dinas;
- e. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dinas.
- f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan oleh dinas;
- g. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan dinas;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan informasi dinas;
- i. menyusun rencana kebutuhan/formasi pegawai untuk kepentingan dinas;
- j. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- k. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, daftar urut kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, kenaikan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup dinas;
- m. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- n. memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin / tugas belajar;
- o. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- p. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- q. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan dinas serta melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
- u. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- v. memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- w. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- x. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- y. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- z. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - aa. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - bb. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - cc. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Program dan Keuangan

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan menyelenggarakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan data perencanaan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (1), Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan rencana anggaran dinas;
 - b. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan dinas;
 - c. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian program dan keuangan;
 - f. penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - g. pelaksanaan pelayanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - h. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(3) Uraian tugas kepala subbagian Program dan keuangan meliputi:

- a. menyusun rencana kerja subbagian program dan keuangan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
- c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayarannya;
- e. melaksanakan perbendaharaan keuangan dinas;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan;
- g. melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- j. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan;
- m. melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan;
- n. menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- o. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan kinerja dinas;
- q. mengkaji bahan-bahan petunjuk teknis dan/atau pedoman tentang pendataan pengolahan sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- r. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing bidang pada dinas;
- s. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi dan mengkaji usulan program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan prioritas program dan kegiatan bagi pimpinan;

- t. melaksanakan fasilitasi pengolah data, pengolah sistem informasi, perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan;
- u. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas sebagai bahan penyusun rencana kerja dinas;
- v. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra), indikator kinerja utama (iku), rencana kerja tahunan (rkt), penetapan kinerja (tapkin) dan dokumen-dokumen perencanaan kinerja lainnya;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur (sop) dan standar pelayanan (sp) dinas;
- x. menyiapkan dan mengkaji bahan penyusunan laporan yang meliputi laporan triwulan, semesteran, tahunan, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kepala daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) serta dokumen-dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya yang telah ditentukan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- z. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
 - aa. membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - bb. mengarahkan dan mengendalikan staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - cc. menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
 - dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (dp3) dan atau sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - ee. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat yang benar;
 - ff. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
 - gg. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

hh. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perikanan Tangkap

- (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, penyusunan petunjuk teknis, perencanaan, fasilitasi dan bimbingan teknis bidang perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), bidang perikanan tangkap menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - b. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - d. pelaksanaan fasilitasi koordinasi perencanaan pengembangan dan/atau rehabilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
 - f. pemanfaatan dan pembangunan teknologi kelautan dan perikanan tangkap yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.

Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- (2) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan pemberdayaan nelayan kecil;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data pemberdayaan nelayan kecil;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan nelayan kecil;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan kecil;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan pendampingan bagi nelayan kecil;
- e. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi, dan informasi bagi nelayan kecil;
- g. penyusunan dan perencanaan pengembangan kelembagaan usaha nelayan kecil;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sistem informasi dan penataan sentra nelayan kecil;
- i. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan nelayan kecil;
- j. melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan dan pembuatan alat penangkap ikan;
- k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut;
- l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan nelayan kecil;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta penerapan teknologi perikanan tangkap di lapangan;
- n. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

- (1) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- (2) Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, fasilitasi dan bimbingan Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan evaluasi serta pelaporan data pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
 - d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
 - e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pemberdayaan kelembagaan TPI;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan perencanaan pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana TPI;
 - g. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, perikanan budidaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - b. pelaksanaan penyiapan koordinasi sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan kecil pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik;
 - d. pelaksanaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda

- Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- e. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan penerbitan SIUP di Bidang Pembudidayaan Ikan, penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI), penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH), pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:
- a. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan
 - b. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
- (2) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi bagi pembudidaya ikan;
 - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan perencanaan pembangunan dan/atau rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana usaha kecil pembudidaya ikan;

- g. menyusun bahan pelaksanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan usaha kecil pembudidaya ikan;
- h. pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- i. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

- (1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya;
- (2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data, identifikasi, analisis, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPH dan TPKEPH;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan perencanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan ikan, informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan Ikan, TPUPH dan TPKEPH;
 - c. pelaksanaan penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - d. pelaksanaan penyediaan pakan ikan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan;

- f. pelaksanaan pembinaan Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Pembesaran Ikan yang baik;
- g. pelaksanaan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- h. pelaksanaan pengawasan usaha pembudidaya ikan dalam rangka penertiban usaha perikanan;
- i. pelaksanaan perencanaan penataan sentra usaha pembudidayaan ikan kecil;
- j. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Ketahanan Pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang Ketahanan Pangan;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahkan:
 - a. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 - b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan

- (1) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan ketersediaan pangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran ketersediaan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - g. melakukan penyiapan pemanfaatan ketersediaan pangan pemerintah kabupaten;
 - h. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan

- (1) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi, keamanan pangan dan jkerawanan pangan;

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2), Seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- g. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- i. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganeekaragaman konsumsi pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- l. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi Konsumsi, Keamanan Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada point (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok dimaksud pada point (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada point (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2. Susunan Organisasi

Jumlah pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebanyak 30 orang, dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Golongan

a. Golongan IV sebanyak 6 orang, terdiri dari :

- Golongan IV/a = 4 orang
- Golongan IV/b = 1 orang
- Golongan IV/c = 1 orang

b. Golongan III sebanyak 19 orang, terdiri dari :

- Golongan III/a = 6 orang
- Golongan III/b = 2 orang
- Golongan III/c = 3 orang
- Golongan III/d = 8 orang

c. Golongan II sebanyak 5 orang, terdiri dari :

- Golongan II/b = 2 orang
- Golongan II/c = 1 orang
- Golongan II/d = 2 orang

2) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

a. Pascasarjana (S2) sebanyak 5 orang

- b. Sarjana (S1) sebanyak 18 orang
 - c. Diploma sebanyak 3 orang
 - d. SMA/ sederajat sebanyak 3 orang
 - e. SD/SMP/ sederajat sebanyak 1 orang
- 3) Sumberdaya Manusia Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Eselon
 - a. Eselon II sebanyak 1 orang
 - b. Eselon III sebanyak 4 orang
 - c. Eselon IV sebanyak 8 orang
 - d. Non eselon sebanyak 17 orang
- 4) Susunan Organisasi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan



2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya oleh undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 Ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.

Untuk menentukan indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan didasarkan pada tupoksi yang ditetapkan dalam Peraturan

Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan.

Dalam mengimplementasikan perencanaan strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan tahun 2017 – 2021 guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati Pangandaran maka sasaran prioritas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran adalah mengacu pada misi dinas yaitu 1) Mengoptimalkan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya; 2) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; dan 3) Menjadikan Kabupaten Pangandaran termasuk Kabupaten Tahan Pangan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan lima tahun ke depan.

Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya alam masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya penggunaan bahan dan alat penangkapan terlarang;
2. Rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang antara lain di sebabkan struktur armada yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil, belum terintegrasinya sistem produksi hulu dan hilir, dan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang di bangun;
3. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, dan serangan hama dan penyakit ikan/udang serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya;
4. Pada aspek pengolahan hasil perikanan masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang belum sepenuhnya dapat mendukung persyaratan mutu produk olahan hasil perikanan dimana masih banyak penggunaan formalin atau bahan tambahan terlarang lainnya yang digunakan sebagai bahan pengawet produk perikanan.
5. Aktifitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada didaratan maupun sepanjang pesisir pantai dan dilautan, tidak luput dari tantangan alam dan potensi bencana alam yang dapat terjadi. Bencana

alam seringkali menimbulkan berbagai kerusakan mulai dari tingkat ringan hingga berat yang merusakkan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, perumahan penduduk hingga korban jiwa, yang memerlukan upaya mitigasi yang lebih baik.

Adapun peluang yang mendukung pembangunan Kelautan dan Perikanan lima tahun ke depan antara lain :

1. Adanya upaya percepatan dan terobosan dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang didukung dengan kebijakan ekonomi serta iklim sosial politik yang kondusif. Dalam kaitan ini, koordinasi dan dukungan lintas sektor serta para pemangku kepentingan lainnya menjadi salah satu prasyarat yang sangat penting;
2. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlunya didukung munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar.
3. Peningkatan permintaan akan produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan kesadaran akan gizi ikan yang lebih sehat dapat menjadi peluang pengembangan pasar bagi komoditas dan produk perikanan;
4. Adanya dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta ketahanan pangan;

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perencanaan Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran menghadapi beberapa permasalahan yang terkait dengan isu-isu strategis.

3.1 Analisis Isu-isu Strategis

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (*strenghts and weaknesses*) dan kondisi eksternal (*opportunities and threats*) yang melekat pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI).

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada lingkungan internal, akan dapat diidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Karena bersifat internal, semua faktor kekuatan dan faktor kelemahan ini berada dalam jangkauan kapasitas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk mempengaruhinya.

A. Analisis Kekuatan (*Strengths*)

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 31/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
Pemekaran SKPD dari Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan menjadi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan akan memberikan kekuatan dan peluang yang lebih besar untuk mewujudkan keinginan dalam melayani masyarakat.
- b. Garis pantai yang cukup panjang dan memiliki potensi sebagai lokasi budidaya perikanan dan penangkapan ikan.
- c. Sebagai daerah yang memiliki wilayah dataran tinggi dan rendah memiliki pantai panjang ditunjang oleh potensi pariwisata menjadikan ketersediaan pangan masyarakat dan diversifikasi pangan masyarakat cukup kuat.
- d. Pembangunan sektor kelautan, perikanan dan ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi yang tinggi dalam aspek dukungan masyarakat dalam menunjang fisik.

- b. Kebijakan dalam RPJPD dan RJPMD Kabupaten Pangandaran yang memprioritaskan pembangunan untuk mencapai tingkat disparitas wilayah yang rendah.

Dengan prioritas kebijakan ini berarti alokasi pembangunan lebih ditingkatkan termasuk di dalamnya sektor kelautan dan perikanan serta ketahanan pangan, karena mayoritas mata pencaharian penduduk bergantung pada pertanian, hasil laut dan perikanan sehingga sektor ini yang mempunyai daya ungkit/dongkrak yang penting bagi peningkatan ekonomi penduduk.

- c. Tumbuhnya kelompok masyarakat atau stakeholder yang ikut berperan dalam pelestarian dan pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dengan semakin banyak pihak yang ikut berperan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan maka tingkat keberhasilan pembangunan menjadi lebih tinggi dan lebih akuntabel.

B. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

- a. Sebagai SKPD baru masih banyak urusan pemerintahan bidang kelautan perikanan dan ketahanan pangan dari sisi kebijakan program dan kegiatan belum terlaksana secara optimal.
- b. Keterbatasan petugas teknis baik dalam jumlah maupun kualifikasi. Petugas yang menduduki jabatan bukan berlatar belakang pendidikan teknis sehingga tingkat pengetahuan dan kemampuannya terbatas. Jumlah staf dan petugas teknis di lapangan masih sangat kurang.
- c. Masih kurangnya/buruknya infrastruktur dasar bidang kelautan perikanan dan ketahanan pangan

- d. Sumber daya manusia bidang kelautan, perikanan dan ketahanan pangan perlu ditingkatkan agar mampu menciptakan kemandirian, mampu berdaya saing dan berkualitas.

Dengan masih terbatasnya kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan membuat penerapan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan skala usaha bidang kelautan dan perikanan menjadi terbatas sehingga hasil yang diinginkan belum optimal.

- e. Program kemitraan dengan masyarakat belum berjalan baik di bidang urusan kelautan, perikanan dan ketahanan pangan.
- c. Keterbatasan Dana
Keterbatasan dana menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan menjadi terbatas sehingga keinginan masyarakat belum dapat terpenuhi semuanya

2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE)

A. Peluang (*Opportunity*)

- a. Terbukanya pangsa pasar.
Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap produksi kelautan dan perikanan. Selain itu adanya globalisasi ekonomi semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor. Meningkatnya permintaan pasar tersebut perlu didukung dengan munculnya usaha-usaha kelautan dan perikanan baru yang inovatif, produktif dan tanggap terhadap kebutuhan pasar untuk menghasilkan produksi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar/masyarakat. Untuk itu pengembangan sentra-sentra produksi yang berskala ekonomi serta keanekaragaman jenis komoditas perikanan merupakan hal yang penting..
- b. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang cukup besar.
Dengan potensi luas lahan budidaya, luas perairan umum serta laut yang menjadi wewenang daerah dan tenaga kerja yang ada maka sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dijadikan sumber penggerak ekonomi daerah.
- c. Program pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) yang dilaksanakan di daerah.
Dengan adanya program kegiatan pemerintah pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Pangandaran maka akan mendukung percepatan pembangunan perikanan daerah melalui industrialisasi berbasis *blue economy* yang secara teknologi maupun pendanaan tidak dimiliki oleh daerah.

B. Tantangan (*Threat*)

- a. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan
Upaya peningkatan produksi perikanan dan kelautan saat ini terkendala oleh penurunan daya dukung lingkungan perairan,

b. Adanya ancaman hama penyakit, bencana alam dan pelanggaran hukum kelautan dan perikanan.

Analisis S W O T

INTERNAL EKSTERNAL	<u>STRENGTH (S)</u> ☐ Adanya Perda Nomor 31/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran ☐ Kebijakan RPJPD dan RJPMD untuk mencapai tingkat disparitas wilayah yang rendah ☐ Tumbuhnya kelompok masyarakat yang ikut berperan dalam pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan	<u>WEAKNESS (W)</u> ☐ Keterbatasan petugas teknis, baik dalam jumlah maupun kualifikasi ☐ Kualitas pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang masih rendah ☐ Keterbatasan Dana
	<u>OPORTUNITY (O)</u> ☐ Terbukanya pangsa pasar ☐ Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar ☐ Program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah	<u>STRATEGI (SO)</u> Mendayagunakan potensi dan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan usaha perikanan secara cepat dan tepat
		<u>STRATEGI (WO)</u> Meningkatkan kemampuan teknis aparatur dan kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan guna percepatan pembangunan perikanan

<u>THREATS (T)</u>	<u>STRATEGI (ST)</u>	<u>STRATEGI (WT)</u>
☐ Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan ☐ Adanya hama penyakit, bencana alam dan pelanggaran hukum kelautan dan perikanan ☐ Masuknya produk impor .	Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, pelestarian dan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya saing produk	Mengoptimalkan SDM aparatur dan sarana prasarana yang tersedia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang ada

3. Faktor Penentu Keberhasilan

Dari analisa SWOT tersebut diatas maka strategi yang dipilih yang merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan potensi dan peran serta masyarakat untuk mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan dan pengembangan usaha perikanan secara cepat dan tepat
2. Meningkatkan kemampuan teknis aparatur dan kualitas pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan guna percepatan pembangunan perikanan.
3. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengawasan, pelestarian dan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan daya saing produk
4. Mengoptimalkan SDM aparatur dan sarana prasarana yang tersedia untuk menghadapi perubahan lingkungan yang ada.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Adapun isu-isu strategis yang teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Ketidakpastian produksi ikan tangkap
 Ketidakpastian produksi tangkapan ikan karena ketidakpastian cuaca, cuaca yang ekstrim, ketidakpastian arah angin
 Ketidakpastian produksi ikan tangkapan juga dikarenakan sarana prasarana penangkapan ikan belum memadai seperti armada penangkapan ikan masih kecil (di bawah 5 GT), pengetahuan dan keterampilan nelayan terbatas
- 2) Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan

PAD dari sektor perikanan bersumber dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Masih adanya kebocoran penjualan hasil tangkapan nelayan merupakan faktor utama masih kecilnya PAD sektor perikanan.

3) Kualitas infrastruktur perikanan masih belum memadai

Infrastruktur perikanan dapat mendukung produksi perikanan dan meningkatkan perekonomian nelayan. Infrastruktur perikanan diantaranya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Alat Tangkap dan Alat Bantu Perikanan, Tempat Pendaratan Perahu, bangunan pengaman pantai dan keselamatan nelayan.

4) Data jumlah nelayan yang belum valid/akurat

Pendataan nelayan dan pelaku usaha perikanan perlu dilaksanakan, sehingga tercipta data base nelayan yang akurat. Data base nelayan dan pelaku usaha perikanan dapat bermanfaat diantaranya untuk pembuatan Kartu Keanggotaan Nelayan dan Asuransi Nelayan.

5) Belum tersedianya benih dan induk ikan yang berkualitas sehingga perlu operasionalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dalam rangka memenuhi ketersediaan benih dan induk ikan yang berkualitas.

6) Potensi pengembangan pasar ikan dalam rangka pengelolaan dan manajemen pemasaran hasil budidaya perikanan.

7) Informasi harga pasar benih dan ikan konsumsi air tawar belum stabil, sehingga perlu standarisasi harga oleh instansi terkait

8) Peningkatan kapasitas produksi ikan melalui bantuan benih ikan, pakan dan penataan kelompok.

9) Pemberdayaan kelompok perikanan melalui pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan.

10) Menurunnya populasi ikan dan udang di perairan umum sehingga perlu dilakukan restocking ikan/udang di perairan umum

11) Pengembangan kapasitas kelompok dalam rangka ketersediaan pakan ikan mandiri melalui pelatihan dan bantuan sarana pembuatan pakan ikan.

12) Di musim penghujan yang terus menerus semua pembudidaya berhati-hati timbulnya penyakit, upayakan untuk menjaga kualitas air dan kesehatan lingkungan

13) Lemahnya akses pangan masyarakat sehingga perlu pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah

- 14) Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat sehingga diperlukannya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
- 15) Mengatasi lemahnya koordinasi lintas sektor melalui peningkatan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.
- 16) Mengatasi tingginya prosentase penduduk rawan pangan dengan meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di lingkungan.
- 17) Pemantauan harga dan pasokan pangan pokok secara berkelanjutan untuk mengatasi fluktuasi harga.
- 18) Mengatasi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras melalui percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
- 19) Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal dalam rangka mengatasi ketergantungan pada pangan impor/luar daerah.
- 20) Masih ditemukannya ketidakamanan pangan sehingga perlu penguatan dan pembinaan keamanan pangan.

3.3. Tethahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3.1. Visi Kabupaten Pangandaran

Visi Jangka Menengah (Tahun 2016-2021) Kabupaten Pangandaran adalah :

“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”

3.3.2. Misi Kabupaten Pangandaran

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021

sehingga, maka misi pembangunan Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021 adalah :

Misi Pertama : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan efisien. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Misi Kedua : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan. Dimaksudkan untuk menciptakan

keharmonisan dalam penataan lingkungan melalui pembangunan dengan mempertimbangkan kelestarian alam serta memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pembudidayaan kawasan diarahkan untuk tetap menjaga kesetimbangan ekologis guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

Misi Ketiga : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kabupaten Pangandaran melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas. Infrastruktur mencakup jaringan jalan, drainase, sewerage, dan lain lain yang memenuhi standar tinggi sebagai dukungan langsung terhadap terciptanya kawasan wisata yang berkelas dunia. Pembangunan insfrastruktur juga diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah baru, untuk menghubungkan antar objek wisata serta untuk menyediakan jalan alternatif bagi jalan yang sudah ada. Untuk memenuhi standar kualitas yang mampu mewujudkan kepariwisataan berkelas dunia, sudah barang tentu juga diperlukan dukungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna membentuk sistem infrastruktur yang cerdas. Terciptanya sistem infrastruktur cerdas, sistem pemerintahan cerdas, sistem ekonomi cerdas, sistem masyarakat cerdas, sistem hidup cerdas serta sistem lingkungan cerdas diharapkan bersama-sama akan mewujudkan Pangandaran Kabupaten Cerdas.

Misi Keempat : Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal. Dimaksudkan untuk melestarikan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nilai nilai kearifan lokal merupakan warisan budaya yang terbentuk melalui proses interaksi antar manusia dan manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan yang dipengaruhi oleh pandangan, sikap dan perilaku. Nilai nilai kearifan lokal berorientasi pada keseimbangan, kelestarian dan harmoni manusia, alam, dan budaya. Dalam era globalisasi saat ini, banyak ditemui ancaman global yang akan berdampak terhadap krisis nilai nilai kearifan lokal, sehingga upaya-upaya penguatan ketahanannya perlu dilakukan.

Misi Kelima : Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibangun untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.

Misi Keenam : Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengembangkan sistem pembiayaan daerah terpadu.

Visi misi di atas merupakan perwujudan dari Janji Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran sebagai berikut.

Tabel 3.3

Janji Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Terpilih

No.	Misi	Urusan	Janji Bupati/Wakil Bupati
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani	1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 2. Urusan Kearsipan 3. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Urusan Komunikasi dan Informatika 5. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1. Perencanaan dan penerapan APBD yang berpihak kepada rakyat 2. Percepatan pembangunan perdesaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur desa
2	Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	1. Urusan Penataan Ruang 2. Urusan Lingkungan Hidup 3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	1. Penataan dan pengembangan kawasan wisata 2. Pembangunan sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berwawasan lingkungan
3	Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas	1. Urusan Pekerjaan Umum 2. Urusan Perumahan 3. Urusan Perhubungan 4. Urusan Lingkungan Hidup	1. Percepatan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran 2. Percepatan pembangunan Rumah Sakit dan Puskesmas yang memadai 3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi

No.	Misi	Urusan	Janji Bupati/Wakil Bupati
			4. Pembangunan dan peningkatan jalan yang antar kawasan pariwisata 5. Peningkatan kualitas jalan kabupaten dan penghubung ibu Kabupaten 6. Peningkatan dan pengembangan jalan poros tengah (Pangleseran Cikohkol)
4	Memperkuat katahanan nilai-nilai kearifan lokal	1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata	1. Pemberian beras untuk pesantren 2. Peningkatan kesejahteraan guru ngaji, madrasah dan pengelola masjid 3. Pengembangan budaya dan pelestarian kearifan lokal 4. Jaminan kesehatan untuk ulama
5	Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing	1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Perpustakaan 3. Urusan Kesehatan 4. Urusan Keluarga Berencana 5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Urusan Sosial 7. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	1. Pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan dasar hingga tingkat SLTA guna mempercepat terlaksananya wajib belajar 12 tahun 2. Gratis pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) 3. Pembentukan-pembentukan unit penanggulangan kemiskinan, gratis raskin, gratis jaminan pendidikan, dan kesehatan bagi warga tidak mampu 4. Pengembangan pendidikan agama islam untuk semua anak didik
6	Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan	1. Urusan Ketenagakerjaan 2. Urusan Penanaman Modal 3. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 4. Urusan Perdagangan 5. Urusan Industri 6. Urusan Ketahanan Pangan 7. Urusan Pertanian 8. Urusan Kelautan dan Perikanan 9. Urusan Pariwisata	1. Peningkatan pendapatan petani dan produksi hasil pertanian 2. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir 3. Pengembangan industri kreatif 4. Penguatan ketahanan pangan

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Sesuai UU No. 21 tahun 2012 tentang pembentukan Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat, dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki sasaran kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat, kemandirian masyarakat dan pengokohan ketahanan keluarga.
2. Memperkuat pembangunan ekonomi perdesaan dan regional, peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, penguatan UMKM dan daya saing usaha;
3. Modernisasi pemerintahan dan peningkatan partisipasi publik;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan mewujudkan Pangandaran yang nyaman melalui pembangunan yang berkelanjutan; dan
5. Mengembangkan seni, budaya, dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal serta memperkuat peran pemuda dan olahraga

Untuk melaksanakan dan menunjang terwujudnya pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang diamanatkan UU No. 21 tahun 2012 tersebut, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana instansi hendak dibawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder.

Berawal dari cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan didukung peran serta seluruh elemen instansi, masukan-masukan dari stakeholders, dan dengan memperhatikan visi Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta nilai-nilai yang dianut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi, maka dirumuskan visi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

***“Terwujudnya Sektor Perikanan yang Tangguh
menuju Ketahanan Pangan yang Mandiri”***

Visi diatas mengandung makna didalamnya bahwa dengan membangun sektor perikanan untuk berkontribusi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di

wilayah Kabupaten Pangandaran dan Propinsi Jawa Barat pada umumnya. Hal tersebut dapat dicapai melalui :

- Mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan yang memadai.
- Penyediaan cadangan pangan daerah, ketersediaan informasi pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan.

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi pembangunan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021 tersebut, misi yang antara lain :

1. Meningkatkan produksi perikanan.
2. Meningkatkan infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan dan ketahanan pangan yang mantap.
3. Meningkatkan ketahanan pangan daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Berdasarkan pernyataan visi dan misi dinas ditetapkanlah tujuan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan.
2. Meningkatnya infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan dan ketahanan pangan yang mantap.
3. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan pernyataan tujuan diatas, maka ditetapkan sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan produksi perikanan.
2. Terwujudnya infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan dan ketahanan pangan yang mantap.
3. Terwujudnya ketahanan pangan daerah.

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data yang cukup relevan, cepat, tepat dan akurat serta analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Strategi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran yang diuraikan dalam berbagai Kebijakan, Program dan Kegiatan, yaitu :

No.	Tujuan	Strategi
1.	MISI SATU : Meningkatkan produksi perikanan	
	Meningkatnya produksi perikanan	Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bewawasan lingkungan.
2.	MISI DUA : Meningkatkan infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan dan ketahanan pangan yang mantap	
	Meningkatnya infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan dan ketahanan pangan yang mantap	Penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan yang memadai
3.	MISI TIGA : Meningkatkan ketahanan pangan daerah	
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Penyediaan cadangan pangan daerah, ketersediaan informasi pangan, pengawasan dan pembinaan keamanan pangan serta penanganan daerah rawan pangan

Antara Visi, Misi, dan Strategi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, sedangkan Strategi merupakan

proses memutuskan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan.

Strategi digunakan untuk menentukan / mewujudkan visi dan misi organisasi dan membagi-bagi sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Organisasi pada mulanya memiliki cita-cita atau tujuan akhir yang ingin dicapai dalam jangka panjang yang disebut visi, selanjutnya untuk mencapai / mewujudkan visi organisasi yang telah ditentukan tersebut, organisasi merumuskan upaya-upaya umum yang hendak dilakukan yang disebut misi, kemudian untuk mewujudkan misi, organisasi membuat / merumuskan upaya-upaya khusus yang dirasa paling efektif dan efisien untuk mencapai cita-cita organisasi.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program / kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Kebijakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kebijakan (umum) Kepala Dinas yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan infrastruktur dan sarana/prasarana perikanan serta ketahanan pangan
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pengelolaan sumber daya perikanan yang optimal dan berkelanjutan.
4. Ketahanan pangan dan gizi berbasis komoditas lokal.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2017-2021 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan untuk pengembangan usaha perikanan tangkap melalui pengembangan infrastuktur, sarana/prasarana, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan yang berkelanjutan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI
- b. Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Nelayan
- c. Pengadaan Sarana Prasarana TPI
- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap
- e. Pemeliharaan Berkala TPI
- f. Penataan Kawasan Perikanan Tangkap

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Program ini diarahkan untuk pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk dilaksanakan usaha budidaya.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
- b. Pengembangan Budidaya Ikan Air Payau

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan dari hasil budidaya ikan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Kegiatan Pengembangan Induk Ikan Unggul
- b. Intensifikasi Balai Benih Ikan Cimerak
- c. Bantuan Benih Ikan, pakan dan peralatan
- d. Bantuan Sarana Pembuatan Pakan Ikan
- e. Penebaran benih ikan di perairan umum
- f. Pengadaan Kendaraan Operasional BBI
- g. Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya BBI
- h. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan pembudidaya ikan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini diarahkan sebagai sarana promosi produk dan pengembangan perikanan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Intensifikasi Pasar Ikan Cimerak
- b. Penanganan Ikan hasil tangkapan
- c. Pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasaran
- d. Pameran dan Promosi
- e. Bimbimang Teknis Teknologi Penangkapan Ikan
- f. Perikanan Kabupaten Pangandaran Dalam Angka

Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

Program ini diarahkan dalam rangka penegakkan hukum dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Penataan Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)
- b. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pokmaswas dan Rukun Nelayan
- c. Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)
- d. Pembangunan Kawasan Minawisata Berbasis Konservasi (Ekowisata Mangrove Pangandaran)
- e. Pemberdayaan Kelompok Konservasi Penangkaran Penyu Legokjawa Cimerak
- f. Dukungan Proyek Integrated Marine Eco Technopark (IMET)
- g. Dukungan Proyek Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute (PIAMARI)
- h. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini diarahkan untuk peningkatan ketahanan pangan menuju kabupaten yang mandiri.

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
- b. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar
- c. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan
- e. Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
- f. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
- g. Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien
- h. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
- i. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur
- j. Pemantapan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan
- k. Peningkatan Motivasi dan Apresiasi Ketahanan Pangan Masyarakat
- l. Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling Keamanan Pangan
- m. Partisipasi Hari Pangan Sedunia
- n. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termuat pada lampiran 1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk periode 2017-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021. Indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk periode 2017-2021 antara lain :

1. Urusan Kelautan dan Perikanan
 - a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
 - b. Tingkat pemanfaatan budidaya :
 - Laut
 - Air payau
 - Kolam air tenang
 - Mina padi
 - Jaring Apung
 - c. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya :
 - Gurame
 - Lele
 - Mujair
 - d. Meningkatnya Pendapatan :
 - Nelayan
 - Petani Ikan
 - e. Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan hukum pendayagunaan SD laut
2. Urusan Pangan
 - a. Ketersediaan Energi
 - b. Ketersediaan Protein
 - c. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan
 - d. Penanganan Daerah Rawan Pangan
 - e. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

f. Penguatan Cadangan Pangan

g. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

h. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Adapun target capaian indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran untuk periode tahun 2016-2021 disajikan pada lampiran 2.

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis dinas yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Dengan dijalankannya renstra ini secara konsisten, diharapkan akan tercipta kesatuan gerak dari stakeholders pembangunan kelautan dan perikanan. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan kelautan dan perikanan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Melalui Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Forum SKPD, *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Kelaut, Perikanan dan Ketahanan Pangan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomani Renstra Dinas dan hasil musrenbangkab/RKPD Final. Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan semua daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah di susun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pangandaran kita perlukan agar tindakan yang kita lakukan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Berkas	Indikator Baseline	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)	Batas Capaian pada tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan										Unit Kerja SKPD Penang gungja wab	Loka		
						Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
2	3	5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya Administrasi perkantoran	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							394.587.000		737.200.000		842.880.000		927.168.000		1.019.884.800		3.921.719.800		
Pegawai DKPKP	Tersedianya barang habis pakai		Penyediaan jasa surat menyurat	Barang habis pakai		1237 buah	5.622.000	1237 buah	8.000.000	1500 buah	8.800.000	1600 buah	9.680.000	1800 buah	10.648.000	7374 buah	42.750.000	DKPKP	Kab. Pangand
Pegawai DKPKP	Terpenuhi kebutuhan listrik dan internet		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Meningkatnya kinerja aparatur		2 rekening	75.000.000	2 rekening	80.000.000	2 rekening	88.000.000	2 rekening	96.800.000	2 rekening	106.480.000	2 rekening	446.280.000	DKPKP	Kab. Pangand
Pegawai DKPKP	Terfasilitasinya biaya perizinan kendaraan dinas		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kinerja aparatur		2 jenis	9.000.000	2 jenis	10.000.000	2 jenis	11.000.000	2 jenis	12.100.000	2 jenis	13.310.000	2 jenis	55.410.000	DKPKP	Kab. Pangand
Pegawai DKPKP	Terperuhnya kebutuhan Jasa Kebersihan		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kinerja aparatur		1 org	9.054.000	1 org	18.200.000	2 orang	36.000.000	2 orang	39.600.000	2 orang	43.560.000	2 orang	146.414.000	DKPKP	Kab. Pangand
Pegawai DKPKP	Terperuhnya kebutuhan jasa tenaga keamanan		Penyediaan jasa pengamanan kantor	Meningkatnya kinerja aparatur		1org	9.054.000	1org	18.200.000	2 orang	36.000.000	2 orang	39.600.000	2 orang	43.560.000	2 orang	146.414.000	DKPKP	Kab. Pangand
Pegawai DKPKP	Terperuhnya kebutuhan supir dan arsiparis		Penyediaan jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga	Meningkatnya kinerja aparatur		2 org	24.108.000	1 org supir, 2 org tenaga jasa administ rasi	54.800.000	1 org supir, 2 org tenaga jasa administ rasi	60.280.000	1 org supir, 2 org tenaga jasa administ rasi	66.308.000	1 org supir, 2 org tenaga jasa administ rasi	72.938.800	1 org supir, 2 org tenaga jasa administ rasi	278.434.800	DKPKP	Kab. Pangand
Pegawai DKPKP	Terperuhnya kebutuhan alat tulis kantor		Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya kinerja aparatur		69 jenis	88.449.400	80 jenis	100.000.000	85 jenis	110.000.000	90 jenis	121.000.000	95 jenis	133.100.000	100 jenis	552.549.400	DKPKP	Kab. Pangand
Pegawai DKPKP	Terperuhnya kebutuhan barang cetakan, penggantian dan jasa dokumentasi dan publikasi		Penyediaan barang cetakan lembar, dan penggantian	Meningkatnya kinerja aparatur		5jenis, 7 0.000 lembar, 2jenis	18.000.000	5jenis, 70 000 lembar, 2jenis	25.000.000	3 rek	27.500.000	3 rek	30.250.000	3 rek	33.275.000	3 rek	134.025.000	DKPKP	Kab. Pangand

No	Kategori	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Yurisdiksi	Yurisdiksi	2 jenis, 14 jenis	13.000.000	30 jenis	20.000.000	20 jenis	22.000.000	20 jenis	24.200.000	20 jenis	26.620.000	104.820.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
2	Yurisdiksi	Yurisdiksi	2 jenis	25.000.000	2 jenis	30.000.000	2 jenis	33.000.000	2 jenis	36.300.000	2 jenis	39.930.000	164.230.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
3	Yurisdiksi	Yurisdiksi	4 jenis	6.300.000	4 jenis	50.000.000	10 jenis	55.000.000	15 jenis	60.500.000	20 jenis	66.550.000	238.350.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
4	Yurisdiksi	Yurisdiksi	3 jenis	10.150.000	4 jenis	20.000.000	5 jenis	22.000.000	10 jenis	24.200.000	15 jenis	26.620.000	102.970.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
5	Yurisdiksi	Yurisdiksi	1 pc	5.000.000	6 PC, 4 Laptop	130.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	55.000.000	5 unit	60.500.000	300.500.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
6	Yurisdiksi	Yurisdiksi		3.000.000		3.000.000		3.000.000				3.000.000	12.000.000		
7	Yurisdiksi	Yurisdiksi	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000			1 unit	3.000.000	12.000.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
8	Yurisdiksi	Yurisdiksi		142.302.000		440.000.000		317.500.000		482.750.000		366.025.000	1.748.577.000		
9	Yurisdiksi	Yurisdiksi	4 dokum en	7.500.000	4 dokum en	10.000.000	4 dokum en	11.000.000	4 dokum en	12.100.000	4 dokum en	13.310.000	53.910.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
10	Yurisdiksi	Yurisdiksi	2 dokum en	2.850.000	2 dokum en	5.000.000	2 dokum en	5.500.000	2 dokum en	6.050.000	2 dokum en	6.655.000	26.055.000	DKPKP	Kab. Pangandaran

erah van ngan	Buku Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Peta Kelurahan dan Korintian Pangan Kab. Pangandaran	Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Tersedianya data kelengkapan dan kebutuhan produk pangan masyarakat	1 dokume n, 2 desa	132.100.000	1 dokumen	145.000.000	1 dokumen	159.500.000	1 dokume n	175.450.000	1 dokume n	192.995.000	5 dok	805.045.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
erah di h ngandar	Laporan Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok dan Laporan Informasi Perkembangan Harga Eceran dan Grosir Kebutuhan Bahan Pokok Strategis	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan			24 laporan	50.000.000	24 laporan	55.000.000	24 laporan	60.500.000	24 laporan	66.550.000	96 lap	232.050.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
erah wan ngana	Jumlah Tonase Cadangan Pangan Pemerintah	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	51 ton beras	566.382.000	100 ton Beras	1.000.000.000	100 ton Beras	1.100.000.000	100 ton Beras	1.210.000.000	100 ton Beras	1.331.000.000	451 ton	5.207.382.000	DKPKP	Kab. Pangandaran
erah nyaraka	Meningkatnya pemantauan dan pengembangan koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan melalui Devan Kelurahan Pangan	Pemantauan Koordinasi Devan Kelurahan Pangan	Terkordinasi kannya Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan oleh Devan Kelurahan Pangan			1 Rumusa n Kebijaka n	100.000.000	1 Rumusa n Kebijaka n	110.000.000	1 Rumusa n Kebijaka n	121.000.000	1 Rumusa n Kebijaka n	133.100.000	4 kebijakan	464.100.000	DKPKP	Kab. Pangandaran

No. Urut	Nama Kegiatan	Lokasi	Tahun 1 (2018)				Tahun 2 (2019)				Tahun 3 (2020)				Tahun 4 (2021)				Kendali Risiko pada akhir periode (Risiko Akhir)	Tipe Kegiatan	Lokasi			
			Tgl	Rp	Tgt	Kat	Tgl	Rp	Tgt	Kat	Tgl	Rp	Tgt	Kat	Tgl	Rp	Tgt	Kat						
1	Optimalisasi lahan pekarangan untuk konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman	Kab. Pangandaran			10 KWT			225.000.000	10 KWT			125.000.000	15 kwt			125.000.000	15 kwt			125.000.000	50 kwt		DKPKP	Kab. Pangandaran
2	Buku Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan Kab. Pangandaran	Kab. Pangandaran			1 Dokumen			125.000.000				125.000.000	1 Dokumen			125.000.000				250.000.000	2 dokumen		DKPKP	Kab. Pangandaran
3	Tersedianya mobil Laboratorium Keamanan Pangan	Kab. Pangandaran			1 unit			516.700.000				600.000.000	1 unit			1.116.700.000	2 unit						DKPKP	Kab. Pangandaran
4	Terlaksananya pembangunan lumbung pangan masyarakat dan lantai jemur dengan dikelola oleh kelompok pengelola lumbung pangan	Kab. Pangandaran			10 LPM dan Lantai Jemur			2.000.000.000	10 LPM dan Lantai Jemur			2.200.000.000	10 LPM dan Lantai Jemur			2.420.000.000	10 LPM dan Lantai Jemur			2.662.000.000	40 LPM dan Lantai Jemur		DKPKP	Kab. Pangandaran
5	Terlaksananya pembuatan Detail Engineering Design (DED) dan Pembangunan Gudang Distribusi Pangan	Kab. Pangandaran			36 Bangunan											2.000.000.000	20 Bangunan			2.000.000.000	56 Bangunan		DKPKP	Kab. Pangandaran

[illegible]

[illegible]

No	Kategori	Keterangan	Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Kumulatif selama periode 5 tahun		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
1	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sistem Informasi Keuangan (SIK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinkab)			1 paket	1.453.971.500									1.453.971.500	Dinkab Kab. Pangandaran
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinkab)													3.000.350.000	Dinkab Kab. Pangandaran
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinkab)													107.089.518.000	
4	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinkab)													6.361.500.000	Dinkab Kab. Pangandaran
5	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinkab)													980.153.000	Dinkab Kab. Pangandaran
6	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinkab)													596.150.000	Dinkab Kab. Pangandaran

[illegible]

Kategori	Sub-kategori	Nama Kegiatan	Output dan kegiatan awal	Perencanaan	Tahun-1 (2017)		Tahun-2 (2018)		Tahun-3 (2019)		Tahun-4 (2020)		Tahun-5 (2021)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Prasarana pendauran hasil tangkapan	Pembangunan Dermaga Pendaratan Ikan Palatar Agung	a. Peningkatan PAD dari Retribusi tempat pelelangan ikan, b. Peningkatan produksi perikanan tangkap.		1 paket	200.000.000									1 paket	200.000.000	Kab. Pangandaran	
	Tersedianya lahan untuk pembangunan TPI Bojongsalawe	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan TPI Bojongsalawe	Peningkatan PAD dari Retribusi tempat pelelangan ikan,		1 lokasi	200.000.000									1 lokasi	200.000.000	Kab. Pangandaran	
	Tersedianya lahan untuk perumahan nelayan	Penyediaan Lahan Untuk Perumahan Nelayan	Tersedianya Lahan Untuk relokasi nelayan		1 kawasan	300.000.000									1 kawasan	300.000.000	Kab. Pangandaran	
	Terpeliharanya bangunan TPI	Pemeliharaan Berkala TPI	Peningkatan PAD dari Retribusi tempat pelelangan ikan,		8 TPI	200.000.000	8 TPI	440.000.000	8 TPI	484.000.000	8 TPI	532.400.000	8 TPI			1.656.400.000	Kab. Pangandaran	
	Terlaksananya pembangunan TPI	Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Batukaras	Peningkatan PAD dari Retribusi tempat pelelangan ikan,		1 paket	74.000.000.000									1 paket	74.000.000.000	Kab. Pangandaran	
	Terlaksananya pembangunan Revetment	Pembangunan Revetment Pagar Pendaratan Ikan (TPI) Legokjawa	Terlindungnya kawasan pesisir dari abrasi		1 paket	2.500.000.000									1 paket	2.500.000.000	Kab. Pangandaran	
	Terlaksananya pembangunan Revetment	Pembangunan Pantai Revetment Pamugaran Pangandaran	Terlindungnya kawasan pesisir dari abrasi		1 paket	2.500.000.000									1 paket	2.500.000.000	Kab. Pangandaran	
	Terlaksananya pembangunan Revetment	Pembangunan Pantai Batukaras	Terlindungnya kawasan pesisir dari abrasi		1 paket	2.500.000.000									1 paket	2.500.000.000	Kab. Pangandaran	
	Terlaksananya pembangunan Revetment	Pembangunan Pantai Pasir Gede	Terlindungnya kawasan pesisir dari abrasi		1 paket	5.500.000.000									1 paket	5.500.000.000	Kab. Pangandaran	

[illegible]

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran															
Kategori	Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kunci (Output)	Kategori	Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Laut	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum pelayaran SD laut											49.589.960.000		
	Penataan Kawasan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)	Peningkatan kualitas daya tarik wisata sektor kelautan											1 kawasan	1.250.000.000	Kab. Pangandaran
	Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Pokmaswas dan Rukun Nelayan	a. Penurunan pelanggaran pengelolaan SDI, b. Rehabilitasi vitalisasi kawasan pesisir, c. Peningkatan produksi perikanan tangkap											9 paket	1.144.660.000	Kab. Pangandaran
	Terlaksananya pelatihan kelompok	Penguatan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)											9 kelompok	266.200.000	Kab. Pangandaran
	Tersusunnya DED, Terlaksananya Pengawasan dan Fisik Bangunan Kawasan Wisata	Pembangunan kawasan minwisata berbasis konservasi (Ekowisata Mangrove Pangandaran)											1 paket	40.000.000.000	Kab. Pangandaran
	Terjaganya kelestarian habitat dan populasi penyu	Pemberdayaan Kelompok Konservasi Penyu Legok Jawa Cimerak											1 wilayah	133.100.000	Kab. Pangandaran

											Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Lokasi dan jenis perikanan yang dibangun		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
Pengabdian sebagai mitra dalam kegiatan pembangunan	Pengabdian a. Kegiatan Integrated Marine Eco Technopark (IMET)	Terdilansirnya pembangunan kegiatan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas KPMP	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	Kab. Pangandaran	
Pengabdian sebagai mitra dalam kegiatan pembangunan	Dukungan Kegiatan Integrated Aquarium and Marine Research Institute (PIAMARI)	Terdilansirnya pembangunan kegiatan oleh pemerintah kabupaten melalui dinas KPMP	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	200.000.000	1 paket	Kab. Pangandaran	
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber daya perikanan	Terjaganya kelestarian SDI	1 kab	175.000.000	1 kab	175.000.000	1 kab	175.000.000	1 kab	175.000.000	1 kab	175.000.000	1 kab	175.000.000	1 kab	175.000.000	1 kab	175.000.000	1 kab	Kab. Pangandaran	
TOTAL											2.617.450.000		178.294.591.500		37.360.380.000		47.279.118.000		44.717.529.800		310.269.069.300

Cijulang, April 2017
 Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan
 Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran

RIDA NIRWANA KRISTIANA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19680928 198803 1 003

Tabel 6.1.
INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Bidang Urusan / Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2015)	Target Capaian Tahunan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2019)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian (Ketahanan Pangan)									
1,1	Meningkatnya indeks nilai tukar petani	nilai	129	129	120	155	190	225	139	139
1,2	Tersedianya Kebutuhan Pangan Masyarakat	Ton	63,78	66	72,6	79,86	87,486	96,63	106,293	508,869
1,3	Tersajinya Laporan	dokumen	6	6	7	7	7	7	47	47
1,4	Tersedianya Lumbung Pangan	unit	24	40	70	80	100	125	186	186
1,5	Terselenggaranya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Kali	n.a	-	2	2	2	2	2	10
1,6	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan	Org	-	-	20	20	20	20	20	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1,7	Terlaksananya Pameran Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah	2	1	1	1	1	1	1	6
1,8	Meningkatnya Produksi								-
	-Padi	193,243	Ton	229,154	232,125	235,096	241,038	244,009	1.419.489
	-Jagung	490	Ton	497	504	511	525	532	3,087
	-Kedelai	4,692	Ton	5,474	5,865	5,865	6,647	7,038	37,145
5	Kelautan dan Perikanan								
5,1	Terjaganya Kelestarian Kawasan Sumberdaya Kelautan	9	Kawasan	9	9	9	9	9	54
5,2	Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan hukum pendayagunaan SD laut	-	Orang	-	50	50	50	50	250
5,3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Bahaya Bencana Alam Laut	-	Orang	-	100	100	100	100	500

		(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya											
	- Gurame	Ton		25	26	27	28	29			135
	- Lele	Ton		30	31	32	33	32			158
	- Mujair	Ton		40	41	42	43	44			210
5,5	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2,846	3,131	3,444	3,788	4,167	4,584	5,042	24,156	
5,6	Meningkatnya Pendapatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nelayan	Rp	18.000.000	19.800.000	21.780.000	23.958.000	26.353.800	28.989.180	140.680.980		
	- Petani Ikan	Rp	24.000.000	24.681.600	25.382.557	26.103.422	26.844.759	27.607.150	155.301.088		
5,7	Terjaganya Kelestarian Kawasan Konservasi	lokasi	5	5	-	-	-	-	-	5	

Tabel 6.1
**INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
 YANG MENGIKUTI PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD (HASIL REVIEW)**

Bidang Urusan /Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Bidang Pangan									
Ketersediaan Energi	(Kkal/kapita/hari)	2.200	-	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Ketersediaan Protein	(gr/kapita/hari)	57	-	59	60	62	63	63	63
Penguatan Cadangan Pangan	Ton	-	-	100	100	100	100	100	100
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	%	80	-	90	90	90	90	90	90
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	90	-	90	90	90	90	90	90
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	87	-	88	89	90	90	91	91
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	kali	3	-	3	3	3	4	4	17
Penanganan Daerah Rawan Pangan	desa	6	-	2	1	1	1	1	6
Bidang Kelautan dan Perikanan									
Meningkatnya Kesadaran	Orang	-	-	50	50	50	50	50	250

menyatakan akan melakukan pendayagunaan 500 juta Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya :									
- Gurame	Ton	-	-	25	26	27	28	29	135
- Lele	Ton	-	-	30	31	32	33	32	158
- Mujair	Ton	-	-	40	41	42	43	44	210
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.846	2.876	2.435	2.788	3.067	3.374	3.711	24.156
Meningkatnya Pendapatan :									
- Nelayan	Rp	18.000.000	19.800.000	19.800.000	21.780.000	23.958.000	26.353.800	28.989.180	140.680.980
- Petani Ikan	Rp	24.000.000	24.681.600	24.681.600	25.382.557	26.103.422	26.844.759	27.607.150	155.301.088
Tingkat pemanfaatan budidaya :									
- Laut	%	-	-	1	1	1	1	2	2
- Air payau	%	-	-	66	73	80	88	97	97
- kolam air tenang	%	-	-	50	54	60	66	72	72
- mina padi	%	-	-	6	6	7	7	8	8
- jaring Apung	%	-	-	26	28	31	34	38	38

No.	Desa	No. Pendaftaran	Nama Kelengkapan	Tahun Berdiri	Sifat Usaha	Konsultasi	Jenis Kelengkapan	Nama Ketua	Temp.	Anggota		No. Bk Pengukuran	Luas lahan/luas produksi/luas		periode Waktu		
										L	P		Beasaran	satuan		Produksi (ton)	
3	MANGUNJAYA	Sukamaju	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			1	Kujang Semar	2010	Budidaya Air Tawar	Gurame	P	Saepul		13			15.000	M2	3,6	Tahun
			2	Suka Jaya II	2011	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Wardi		12			20.000	M2	4,8	
			3	Tunas Jaya	2010	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Sahlan		10			15.000	M2	3,6	Tahun
		4	Suka Senang	2010	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	H. Kiking		30			15.000	M2	3,6	Tahun	
		5	Tirta Mukti	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Robi		35			40.000	M2	9,6	Tahun	
		6	Bojong Tirta	2008	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Agus		40			35.000	M2	8,4	Tahun	
		7	Mina Karya	2011	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Sariman		12			20.000	M2	4,8	Tahun	
		8	Peka Jaya	1990	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Saepudin.M		30			50.000	M2	12	Tahun	
		9	Peka Jaya II	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	M	Sakim.M		12			25.000	M2	6	Tahun	
	Mangunjaya	10	Mino Lestari	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	R. Kasmiarjo		25			25.000	M2	6	Tahun	
		11	Setia Karya III	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	junaedi		13			12.500	M2	3	Tahun	
		12	Suka Makmur	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Sudarman		13			10.000	M2	2,4	Tahun	
		13	Tunas wijaya	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Dede Suryaman		13			35.000	M2	8,4	Tahun	
		14	Cempaka (KWT)	2007	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Yeti Legiawati		15			7000	M2	1,68	Tahun	
		15	Karya Muda	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	sukinun		40			8000	M2	1,92	Tahun	
		16	Mekar	2011	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Dede Suryana		18			7500	M2	1,8	Tahun	
		17	Mekar Jaya II	2008	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Eri Yanlar		15			9500	M2	2,28	Tahun	
		18	sawargi	2008	Budidaya Air Tawar	Gurame	M	Supanda		30			10.000	M2	2,4	Tahun	
		19	Mina Jaya	2008	Budidaya Air Tawar	Gurame	M	H. Pahmi		30			10.000	M2	2,4	Tahun	
	Jangraga	20	Rogo sukmo	1995	Budidaya Air Tawar	Gurame	M	Solihun		35			8000	M2	1,92	Tahun	
		21	Wijaya Kusuma (KWT)	2011	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Utari		-	20		8500	M2	2,04	Tahun	
		22	Paguyuban	2008	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Bakir Edi S		13			10.000	M2	2,4	Tahun	
		23	Turangga III	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Sudarto		13			8000	M2	1,92	Tahun	
		24	Jembar Manah	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	A.sarjan		8	3		15.000	M2	3,6	Tahun	
		25	litikurih	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	M	Nono S		16			10.000	M2	2,4	Tahun	
		26	Bibilitik	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Saep		11			12.500	M2	3	Tahun	
		27	Motekar	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Azizi B		19			25.000	M2	6	Tahun	
		28	Tirta barokah	2008	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Ade		25			13.000	M2	3,12	Tahun	
		29	Tirta Mukti Jaya	2006	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Ajum		40			10.000	M2	2,4	Tahun	
		30	Tirta Bahari	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame,Nila Sidat	U	Suyatno		11			15.000	M2	3,6	Tahun	
		31	Mulya Jaya	2008	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	apeng		35			12.000	M2	2,88	Tahun	
		32	Tirta Mulya	2009	Budidaya Air Tawar	Gurame	p	Ratmana		13			10.000	M2	2,4	Tahun	
		33	Tirta Mulya II	1010	Budidaya Air Tawar	Gurame	P	Odon Okas		9	3	10.000	M2	2,4	Tahun		

[illegible]

[illegible]

DATA LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT
BIDANG KETAHANAN PANGAN
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN PANGANDARAN

Kecamatan	Desa	Nama Lumbung	Ketua	Sumber Dana	Tahun Anggaran
Lampiran	Mekarwargi	Pasir Ragas II	H. Nunuh	Swadaya	
	Karangkamiri	Mulyakarya III	Unim	Swadaya	
		Citra Mandiri	Eman AB	Swadaya	
		Karya Sari	Adih	Swadaya	
	Sukamulya	Guna lestari	Suhidin	APBD II	2015
	Bangunjaya	Mekarjaya	Ace	APBD II	2015
	Bojongkondang	Tani Jaya	H. Surdayat	APBD II	2015
	Jadikarya	Saluyu	Jajang Udin	Swadaya	
Pangandaran	Karangsari	Sawargi I	Waridin	Swadaya	
		Sawargi II	Nuridin	Swadaya	
		Sri Waluyo	Dasmo	Swadaya	
		Maju Jaya	Sudarwo	Swadaya	
		Sumber Makmur	Marimin	Swadaya	
		Sanggar Karasan	Kahi	Swadaya	
		Mekarsari	Tusirin	Swadaya	
		Tani Mandiri	Mahmudin	Swadaya	
		Tambaksari	Datoni	Swadaya	
	Sukanagara	Mitra Jaya	Kosim Suhandi	Swadaya	
		Tirta Rahayu	Rasto Efendi	APBD II	2015
		Cahaya Gumilar	Epen Sependi	Swadaya	
	Bojongsari	Puncak Jaya II	Surpi	Swadaya	
		Mekarsari	Yaya Setiawan	Swadaya	
	Paledah	Tirta Rahayu	Supardi	Swadaya	
		Rizky Bina Lestari	Rojikin	APBD II	
		Taruna Karya	Sadikin	Swadaya	
	Ciganjeng	Tunas Lestari	Nursipin	Swadaya	
		Guna Bakti Mulya	Wagiman	Swadaya	
		Kendala Cakra	Rasim	Swadaya	
		Tirta Lugina	Mugi Sujakto	Swadaya	
	Cibogo	Melati	Ening	Swadaya	
		Karya Sadar	Ali Mashuri	Swadaya	
		Karya Bhakti	Maman S	Swadaya	
	Pasirgeulis	Marga Mulya	H. Sahini	DAK	2015
		Tirta Nugraha	Lia Harliah	APBD I	2014
	Sindangwangi	Saluyu III	Uus Kusnita	APBD II	2015
		KUB Bina Mandiri	Wajo Haryanto	Swadaya	
	Maruyungsari	Subur Laksana	Sularmo	Swadaya	
		Suka Hurip	Saripin	Swadaya	
	Karangpawitan	Sejahtera	Abas S	Swadaya	
		Tirta Mandiri	Deden H. M	Swadaya	
	Karangmulya	Sri Mukti Abadi	Sarno	Swadaya	
	Kedungwuluh	Mekarjaya V	Warso	Swadaya	
	Babakan	Budi Utomo	Wasono	Swadaya	
		Harapan Mukti	Herman	Swadaya	
		Mekar Sari	Iwa P	Swadaya	
	Purbahayu	Mekar Wangi	Eti Sa'adah	Swadaya	
		Mekar Jaya	Muhrodi	Swadaya	
	Sidomulyo	Panca Mulya IV	Sutarjo	Swadaya	

	Mekar Jaya I	Tutur Sahri	Swadaya	
	Bina Warga	Mardiono	APBD II	2015
Wonoharjo	Bahagia I	Muhrodin	Swadaya	
	Maju	Mardio	Swadaya	
	Padasuka	Miran	Swadaya	
Cimindi	Harapan Mukti II	Kasji	APBD I	2014
	Karya Mukti I	Padly	APBD II	2015
	Ciwayang Permai	Sarno	Swadaya	
Cigugur	Al- Barokah	Solihin	APBD II	2015
	Lingkung Lembur I	Upan Supandi	Swadaya	
Campaka	Mekarsari	Unen	APBD II	2015
Bunisari	Mandiri	Uri Jumsari	Swadaya	
Harumandala	Wana Tani Mandala	Abdul Rohman	Swadaya	
Masawah	Simasari	Maman	Swadaya	
	Pajar Tani	Rahayu	Swadaya	
	Laksana Setia	Agus	Swadaya	
Batungalang	Tani Mukti	Suryana	APBD II	2015
Sukajadi	Sekar Lumigar II	Abdul Holik	APBD II	2015
	Rukun Tani	Rali Sunarya	Swadaya	
Kertaharja	Karang Tampele	Nono	Swadaya	
Legokjawa	Salirasa	Sahili	Swadaya	
Cimerak	Mekarjayasari	Maman	APBD I	2014
	Cendrawasih II	Sukandi	Swadaya	
Emplak	Karya Mandiri	Ahmad H	Swadaya	
Bagolo	Karapyak	Suyono	Swadaya	
Putrappinggan	Tri Daya	Harna	Swadaya	
Cibuluh	Karya Bakti	Momon	Swadaya	
	Sawargi	H. Ano Kurdi	APBD II	2015
Pamotan	Cinta Laksana	Toto	Swadaya	
Tunggilis	Jaka Suta	Suhidi	APBD II	2015
	Cinta Sari	H. Badrudin	APBD I	2014
	Sangkan Jaya	Dimin	Swadaya	
Kalipucang	Mekar Jaya	Mahpudin	Swadaya	
Kertayasa	Girilaya	Mamat R	Swadaya	
	Karya Mukti	Kasmiri	Swadaya	
Kondangjajar	Sri Mukti Jaya IV	Kusnadi	APBD II	2015
	Sri Mukti Jaya II	Saripudin	APBD II	2015
Ciakar	Mudataruna II	Endeng	Swadaya	
	Mudataruna III	H. Maman	DAK	2016
	Mudataruna V	Totoy Toyibin	Swadaya	
Cibanten	Mitra Karya	H. Usin	Swadaya	
	Margajaya VII	Yuhid Ma'ruf	Swadaya	
Ciliang	LMHJ	Sarli	Swadaya	
	Tunas Mekar	Hasid Suhendar	Swadaya	
	Sri Rejeki	Edih	APBD II	2015
	Malang Tengah	Rus'an	APBD II	2015
Cintakarya	Motekar	Kosim	APBD II	2015
	Karya Mekar IV	Kidin	Swadaya	
Cintaratu	Karya Taruna II	Usdi	Swadaya	
Karangbenda	Makmur	Iing Nurdin	Swadaya	
	Bahagia	Nanas S.	Swadaya	
	Sukamerang	Rusdi Rusmayadi	Swadaya	
	Sari Asih II	Jumid	Swadaya	
	Sejahtera	Kidi	APBD II	2015
Karang Jaladri	Karya Mukti	Hadid	APBD II	2015
Selasari	Mekar I	H. Aceng	APBD I	2014

		Sari Mekar Lestari		Swadaya	
		Sari Mukti	Yaya	APBD II	2015
	Parigi	Harapan Sejahtera		Swadaya	
		Mina Pari	Suhdi	Swadaya	
	Bojong	Mina Loharja	Enju	Swadaya	
	Cibenda	Sangkan Hurip	Engkan	APBD II	2015
	Parakanmanggu	Mekar Mukti	Kalsa	APBD II	2015
		Sumber Rejeki	Bambang	APBD II	2015
	Cikalong	Sri Bahagia	Umbing	Swadaya	
		Mandiri	Kasindi	Swadaya	
		Kali Guha	Kisman	Swadaya	
		Mekar Mandiri	Usli	Swadaya	
		Mekar Saluyu	Sahman	Swadaya	
		Sri Murni	Uswian	Swadaya	
		Srikandi	Kartiwa	Swadaya	
		Sri Mukti	Samid	APBD II	2015
		Mukti Jaya	Komar	Swadaya	
		Sri Melati	Kusman	Swadaya	
		Sri Warna	Ayan	APBD II	2015
		Mekar Saluyu V	Suhanan	Swadaya	
		Merdeka	Kusdi	APBD II	2015
		Makmur Mekar Saluyu	Sutarno	APBD II	2015
		PLC	Karnan	Swadaya	
		Sri Mukti	Narso	Swadaya	
		Berkah Rahayu	Usli	Swadaya	
		Sri Mukti	Sukindi	Swadaya	
		PSC	Kaday	Swadaya	
		PLBK	Uha	Swadaya	
		Sabrang	Enda	Swadaya	
		Srikandi	Kartiwa	Swadaya	
		Harapan Mukti	Maman S.	Swadaya	
		Makmur	Aldi Supriadi	DAK	2015
	Sidamulih	Lumbung Makmur	Adna Hatmaja	Swadaya	
		Makmur I	Nali	APBD II	2015
		Makmur	Asnan Herdiana	APBD II	2015
		Mekar Arum	Sukini	Swadaya	
	Sukaresik	Sri Rejeki	Nandar	Swadaya	
		Barokah	Dedi	APBD II	2015
		Muktisari	Saimun	Swadaya	
	Cikembulan	Turangga	Parno	Swadaya	
	Pajaten	Harapan Makmur	solihin	Swadaya	
	Kalijati	Giri Mukti	Warsim	APBD I	2015
	Mangunjaya	Turangga	Nasim	Swadaya	
		Mekarjaya	Harjo P	Swadaya	
		Paguyuban	Sukinun	Swadaya	
		Tunas Jaya I	Harjo Prayitno	APBD II	2015
		Bangunjaya	Dadang Suryadi	APBD II	2015
	Kertajaya	Pekajaya	Solihin	Swadaya	
		Pekajaya	Amin T	Swadaya	
		Teguh Karya	Kasmiarjo	Swadaya	
		Mekar Bakti	Raki N.	Swadaya	
		Mekar Bakti II	Iran Kasiran		
		Sri Jaya	Sumardi	Swadaya	
		Suka Subur	Komarudin	Swadaya	
	Sukamaju	Suka Senang	Imam D.	Swadaya	
		Suka Senang III	Turiman	APBD II	2015

		Wargi Mekar III	Herman	APBD II	2015
		Sukajaya II	Slamet	APBD II	2015
Sindangjaya		Tunas JM	Hoerudin	Swadaya	
		Hegar M	Endang	Swadaya	
		Tunas H I	Jamiun	Swadaya	
		Puncak Jaya	Sadiman	APBD II	2015
Jangraga		Bina PW	Akim	Swadaya	
		Al- Barokah	H. Lukman	Swadaya	
		Mulya Jaya	Endang E.	Swadaya	
		Karya Mukti	Saing	Swadaya	
		Bakti Jaya	Harun	Swadaya	
		Sada Abadi	Uun	Swadaya	
		Sumber Rejeki	Asjo	Swadaya	
		Jadi Mukti	Unan	Swadaya	
		Sirna Rasa	Katim	Swadaya	
		Karya Budaya	Sakinding	Swadaya	
		Jadi Mukti	Herman	Swadaya	
		Tunas Harapan	Saing	Swadaya	
		Makmur	Ramli	Swadaya	
		Mulya Jaya	A. Mujahidin	APBD II	2015
		Harapan Jaya Mukti	Subagyo	Swadaya	